



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG

JL. MAGELANG - KOPENG KM. 7 KOTAK POS 152 MAGELANG 56101
TELEPON : (0293) 364188. 313024, FAXSIMILI : (0293) 313032
WEBSITE : www.polbangtanmagelang.ac.id
EMAIL : info@polbangtanmagelang.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA - MAGELANG
NOMOR : 1214/Kpts/OT.070/I.8/04/2021

TENTANG :

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA - MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA - MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/08/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polbangtan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/KP.230/M/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Kampus Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Polbangtan Yogyakarta Magelang dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan;

2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Polbangtan Yogyakarta Magelang;

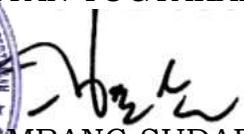
KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta dan Kampus Magelang TA 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2021



DIREKTUR
POLBANGTAN YOGYAKARTA MAGELANG


BAMBANG SUDARMANTO
NIP. 196705091996031002

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
NOMOR : 1214/Kpts /OT.070/I.8/04/2021
TANGGAL : 6 April 2021

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA - MAGELANG

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang;

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

Indikator

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penentu anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi bersih melayani mengacu pada target yang direncanakan.
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 3. Menindaklanjuti hasil Monitoring dan evaluasi. d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pimpinan menjadi Role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas;
 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Penataan Tatalaksana

Indikator

- a. Standar Prosedur Operasional (SOP) kegiatan utama:
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada kegiatan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang
 2. Penerapan SOP
 3. Evaluasi/ Perbaikan SOP

b. E-office/e-government

1. Penyusunan system pengukuran system informasi
2. Penyusunan system kepegawaian berbasis system informasi
3. Penyusunan system pelayanan public berbasis system informasi

c. Keterbukaan informasi public

1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi public;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public

Target :

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

III. Penataan Sistem Manajemen

SDM **Indikator :**

a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

b. Pola Mutasi Internal

1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat);
2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi;

d. Penetapan Kinerja Individu

1. Penerapan penetapan kinerja individu
2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indicator kinerja level di atasnya;
3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic;
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai

f. Sistem Informasi Kepegawaian

1. Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
3. Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

Target :

1. Meningkatkan kinerja pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

V. Penguatan Pengawas

Indikator :

a. Pengendalian Gratifikasi

1. Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi;
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi;

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;

2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
- d. Whistle blowing System
1. Menerapkan Whistle blowing System
 2. Menevaluasi penerapan Whistle blowing System
 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle blowing System
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;

Target :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing- masing bidang pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang;
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Polbangtan Yogyakarta Magelang
4. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada Polbangtan Yogyakarta Magelang

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

- a. Standar Pelayanan
1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja
 2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan
 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
- b. Budaya Pelayana Prima
1. Melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan secara pemberian kompensasi kepada penerepan layanan bila tidak sesuai standar.
- c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;

2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan;

arget:

1. Meningkatkan kualitas pelayan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada Polbangtan Yogyakarta Magelang;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada Polbangtan Yogyakarta Magelang;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Polbangtan Yogyakarta Magelang diukur dengan menggunakan kriteria : **PRESENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP HARUS TUNTAS 100%)**.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui **NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DENGAN MELAKUKAN SURVEY EKSTERNAL**.

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADUAL KEGIATAN

1. Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan
Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Polbangtan Yogyakarta Magelang, dibebankan pada APBN Tahun anggaran 2021 yang tercantum dalam DIPA Polbangtan Yogyakarta Magelang Tahun anggaran 2021, dengan rincian pada item kegiatan **BIAYA ADMINISTRASI UMUM**, dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Biaya benda pos dan pengiriman;
 - b) Biaya ATK;
 - c) Biaya makan minum rapat;
 - d) Biaya Dokumentasi dan Dekorasi;
 - e) Biaya Perjalanan Dinas;
 - f) Biaya Pendidikan Dan Pelatihan SDM;
 - g) Biaya makan minum tamu;
 - h) Biaya Honorarium Kepanitiaan

i) Biaya lain – lain .

2. Jadwal Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											KET		
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1.	Pencanangan /Deklarasi ZI Menuju WBK/WBBM Internal	■													Tim Polbangtan
2.	Pembentukan Tim			■											Direktur
3.	Sosialisasi Program ZI, WBK/WBBM			■	■	■	■								Tim Polbangtan
4.	Pencanangan /Deklarasi ZI Menuju WBK/WBBM Internal dan Eksternal					■									Tim Polbangtan
5.	Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			■	■	■	■	■	■						Tim Polbangtan
6.	Permohonan Asistensi ke TPI						■								Tim Polbangtan
7.	Asistensi Dokumen							■	■						Tim Polbangtan
8.	Pengusulan Calon WBK kepada Sekretaris Badan									■					Tim Polbangtan
9.	Penetapan Calon Oleh Sekba dan dikirim ke Kemenpan-RB									■					Sekba Pusat
10.	Verifikasi oleh Tim Kemenpan-RB dan BPS										■	■			Menpan& RB RI, BPS
11.	Penetapan WBK oleh Menpan-RB RI												■		Menpan & RB RI



[Handwritten signature]

BAMBANG SUDARMANTO
NIP. 196705091996031002